



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. ARIFIN HARUN KERTASAPUTRA

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT

selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AHMAD HERYAWAN

Jabatan : GUBERNUR JAWA BARAT

selaku atasan langsung dari PIHAK KESATU, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung,

2016

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

AHMAD HERYAWAN

Drs. H. ARIFIN HARUN KERTASAPUTRA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580206 198303 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016  
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase Keluarga Miskin yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	0,19%
		Prosentase Penyandang disabilitas yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	0,74%
		Prosentase Anak Terlantar, Jalanan, dan Anak Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	1,49%
		Prosentase Gelandangan, Pengemis dan Eks Gelandangan Psikotik yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	15,06%
		Prosentase Wanita Tuna Susila yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	5,02%
		Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	1,06%
		Prosentase Korban Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	4,89%
		Prosentase Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	0,45%
		Prosentase Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	0,16%
		Prosentase Masyarakat di Daerah Terpencil dan Tertinggal yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	2,12%
		Prosentase Korban Bencana dan Orang Terlantar yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat menjalankan fungsi sosialnya	0,70%

2.	Meningkatnya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial	Prosentase Orsos, Karang Taruna, Tagana yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS	2,82%
		Prosentase PSM, WKSBM, TKSK, Sakti Peksos, Pekerja Sosial, Pendamping yang melakukan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS	6,03%
3.	Meningkatnya intensitas penyelenggaraan kegiatan dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan penanaman nilai kepahlawanan serta kesetiakawanan sosial	Prosentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial	12,10%
		Prosentase Kader masyarakat yang melaksanakan penyuluhan dalam rangka penumbuhan kesadaran nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	4,76%
4.	Optimalnya Pemanfaatan Sumber Pelayanan Kesejahteraan Sosial Melalui Penguatan Jaringan Kerja	Prosentase Dunia Usaha Peduli Sosial yang melakukan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)	1,30%

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	495.000.000	APBD
2.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	150.000.000	APBD
3.	Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur	1.500.000.000	APBD
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.920.700.000	APBD
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	18.362.000.000	APBD
6.	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.954.040.000	APBD
7.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	300.000.000	APBD
8.	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial	21.787.120.000	APBD
9.	Program Pemberdayaan Sosial	2.700.000.000	APBD

10.	Program Perlindungan Sosial	27.832.025.000	APBD
11.	Program Peangulangan Bencana Berbasis Masyarakat	2.000.000.000	APBD
12.	Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan PSKS	7.690.000.000	APBD
13.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial	451.447.000	APBN (Dekonsentrasi)
14.	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	11.748.790.000	APBN (Dekonsentrasi)
15.	Program Rehabilitasi Sosial	17.835.411.000	APBN (Dekonsentrasi)
16.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	12.445.562.000	APBN (Dekonsentrasi)

Bandung,

2016

GUBERNUR JAWA BARAT

KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI JAWA BARAT

AHMAD HERYAWAN

Drs. H. ARIFIN HARUN KERTASAPUTRA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580206 198303 1 007